

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Akuntansi

###### a. Pengertian Akuntansi

Menurut Hery (2015:6), Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan untuk para pengguna informasi akuntansi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan.

Menurut Warren (2014:3), Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi dari suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem yang mengolah data menjadi suatu laporan keuangan sehingga menunjukkan kondisi keuangan untuk kepentingan para pengguna informasi akuntansi.

###### b. Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) merupakan cabang dalam ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan perusahaan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, melalui bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan terbentuk

dari transaksi-transaksi keuangan yang mencakup perubahan dalam aset, hutang, kewajiban, dan juga modal (*equity*) suatu perusahaan. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah menggambarkan data dari setiap transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu serta menyusun laporan keuangan. Akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam menyajikan gambaran terbaru mengenai kondisi perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan atau manajemen perusahaan.

Akuntansi keuangan menurut Kieso (2011:12) merupakan proses yang berakhir dengan penyusunan laporan keuangan dengan mencakup seluruh aspek perusahaan serta akan digunakan oleh baik pihak internal dan dapat juga eksternal.

Menurut Hanafi (2016:29), Akuntansi keuangan adalah sistem untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data untuk pengguna eksternal untuk digunakan dalam membuat keputusan terkait investasi dan kredit.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangannya dibuat yang bertujuan tercapainya manfaat kepada para pihak yang membutuhkannya sesuai dengan tujuan secara menyeluruh.

## 2. Piutang

### a. Pengertian Piutang

Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Transaksi yang terjadi dilakukan secara kredit sehingga menimbulkan adanya piutang setelah perusahaan atau seseorang menjual barang maupun jasa kepada perusahaan atau pihak lain.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2014) dalam PSAK 55, Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Menurut Hery (2017:150), Piutang adalah sekelompok tagihan yang diharapkan diterima bisnis dari pihak ketiga, biasanya dalam bentuk tunai. Tagihan ini dapat berupa hasil dari pemberian pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur, dan piutang bunga), penyediaan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang dagang, pelanggan yang terdiri dari piutang dagang, dan mengizinkan piutang wesel), atau membayar lebih kepada pihak ketiga (untuk piutang pajak).

Dalam rangka usaha memperbesar volume penjualannya kebanyakan perusahaan menjual produknya dengan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas tetapi menimbulkan piutang

langganan dan baru kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk (*cash inflows*) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan semua hal yang berkaitan atas peminjaman berupa uang, barang, dan atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran secara kredit maupun angsuran.

b. Klasifikasi Piutang

Klasifikasi piutang menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 9 Paragraf 07e dinyatakan bahwa piutang usaha merujuk pada piutang yang muncul akibat penjualan produk atau pemberian jasa dalam konteks kegiatan usaha rutin perusahaan. Sedangkan apabila terdapat piutang yang timbul dari transaksi yang tidak terkait dengan kegiatan usaha rutin dikelompokkan sebagai piutang lain-lain. Piutang lancar disini merupakan termasuk didalamnya piutang usaha atau piutang lain-lain yang diperkirakan dapat diambil dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.

Sejalan dengan pernyataan tersebut dalam praktiknya, Menurut Hery (2017:203) piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain.

- 1) Piutang Usaha adalah jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam

jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar.

- 2) Piutang wesel adalah Tagihan yang terutang oleh bisnis kepada pembuat wesel. Dalam hal ini, orang yang berhutang pada bisnis melalui pembelian produk atau layanan secara kredit atau dengan meminjam dana disebut sebagai pembuat wesel. Debitur menjamin untuk membayar bisnis (sebagai debitur) sejumlah uang ditambah bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Wesel atau surat promes, sering dikenal sebagai surat promes, digunakan untuk menyatakan janji pembayaran secara hukum. Instrumen kredit dikenal sebagai wesel untuk pihak yang membuat jaminan pembayaran (dalam contoh ini, produsen wesel), dan itu akan dicatat sebagai hutang wesel. Dokumen ini dikenal sebagai tagihan, dan ditujukan untuk orang yang telah dijanjikan pembayaran. Ini akan dimasukkan dalam pembukuan sebagai piutang wesel.

Neraca dapat mengklasifikasikan piutang wesel sebagai aset lancar atau aset tidak lancar (aset jangka panjang). Piutang wesel yang berasal dari penjualan barang atau jasa dengan metode kredit biasanya dilaporkan dalam neraca sebagai aset lancar.

Sementara itu, piutang wesel yang timbul dari pemberian pinjaman kepada pihak debitur akan dilaporkan dalam neraca kreditur sebagai aset lancar atau aset tidak lancar, tergantung pada jangka waktu pinjaman. Piutang dagang yang belum dibayar setelah jangka waktu kredit telah berakhir dapat digantikan oleh piutang wesel saat ini yang berasal dari penjualan produk atau jasa secara kredit.

3) Adapun piutang lainnya antara lain piutang pajak (tagihan subjek pajak kepada pemerintah berupa restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak), piutang karyawan (tagihan pemberi kerja kepada karyawan yang berutang), piutang dividen, dan piutang bunga (tagihan kreditur kepada debitur sebagai akibat peminjaman uang). Piutang akan dicatat sebagai aset lancar di neraca jika dapat dikumpulkan dalam waktu satu tahun atau selama siklus operasional khas perusahaan, mana yang lebih lama. Dalam kasus lain, faktur akan ditampilkan sebagai aset tidak lancar.

Di samping klasifikasi yang umum seperti di atas, piutang juga dapat diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan non-dagang atau piutang lancar dan tidak lancar.

1) Piutang dagang (*trade receivables*) dihasilkan dari kegiatan normal bisnis perusahaan, yaitu penjualan secara kredit barang atau jasa ke pelanggan. Piutang dagang yang dibuktikan dengan sebuah janji tertulis secara formal oleh pelanggan untuk membayar, diklasifikasikan sebagai piutang wesel (*notes receivable*). Dalam kebanyakan kasus, akan tetapi, piutang dagang merupakan tagihan kepada pelanggan yang tanpa adanya jaminan dari pelanggan untuk membayar, yang sering dikenal sebagai piutang usaha (*accounts receivable*) atau "*open accounts*".

2) Piutang non-dagang (*nontrade receivables*) meliputi semua jenis piutang lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, tagihan kepada perusahaan asosiasi, dan tagihan kepada karyawan, termasuk dalam kategori ini..

Sedangkan menurut Kieso (2016) mengklasifikan piutang dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Klasifikasi piutang berdasarkan tujuannya dalam laporan keuangan yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Piutang lancar (*short term receivables*) yang diharapkan dapat tertagih dalam kurun waktu satu tahun selama siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang.
- b) Piutang tidak lancar (*long term receivables*) adalah jenis piutang dimana yang masuk kategori ini merupakan seluruh piutang yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.

2. Klasifikasi piutang berdasarkan sebab terjadinya piutang tersebut. Klasifikasi ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara piutang hasil perdagangan dan bukan hasil perdagangan, sehingga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Piutang dagang (*trade receivables*) merupakan jumlah terutang oleh pelanggan sebagai bagian dari aktivitas normal bisnis perusahaan berupa penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan yang dapat disub-klasifikasikan lagi menjadi piutang usaha (*account receivable*) dan wesel tagih (*notes receivable*).
- b) Piutang usaha (*accounts receivable*) merupakan janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang di beli, biasanya dapat ditagih dalam kurun waktu 30-60 hari.
- c) Wesel tagih (*notes receivables*) adalah janji tertulis secara formal untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu

tertentu di masa depan (memiliki tanggal jatuh tempo).  
Wesel tagih ini mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1) Wesel tagih tidak berbunga

Jenis wesel tagih ini nilai nominal wesel atau nilai yang tertera dalam lembar wesel sama besarnya dengan nilai jatuh tempo.

2) Wesel tagih berbunga

Jenis wesel tagih berbunga memiliki nilai nominal atau nilai yang tertera dalam lembar wesel tidak sama besarnya dengan nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo terdiri dari nilai nominal ditambah dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu.

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa klasifikasi piutang terdiri menjadi dua macam klasifikasi, yaitu klasifikasi dalam praktik sehubungan dengan laporan keuangan dan klasifikasi secara umum sehubungan dengan sebab terjadinya. Klasifikasi praktik untuk laporan keuangan terbagi menjadi piutang lancar dan piutang tidak lancar. Sedangkan secara umum sehubungan dengan sebab terjadinya terdiri dari piutang dagang dan piutang non-dagang.

c. Piutang Usaha yang Tidak Dapat Ditagih

Menurut Hery (2015:209) Piutang usaha tak tertagih yaitu ketika piutang usaha dicatat, nantinya akan dilaporkan dalam neraca sebagai aset lancar. Piutang usaha yang dilaporkan dalam neraca ini haruslah benar-benar menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih, setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat dalam pembukuan sebagai beban operasional, yaitu dengan menggunakan istilah akun: beban kredit macet (*bad debt expense*), atau beban piutang ragu-ragu (*doubtful account expense*), atau beban piutang yang tidak dapat ditagih (*uncollected method*).

Sedangkan pendapat dari Syakur (2015:107), memberikan pendapatnya mengenai piutang tak tertagih adalah piutang dari pelanggan yang memiliki masalah dalam melakukan pembayaran atas hutang mereka kepada bisnis, misalnya, pelanggan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Agar piutang dilaporkan pada nilai wajarnya, yang sama dengan nilai piutang yang dapat dipulihkan, piutang yang tidak dapat ditagih harus dihapuskan dari total piutang.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa piutang usaha yang tidak dapat ditagih adalah piutang usaha yang diberikan kepada debitur yang kemudian mengalami kesulitan keuangan sehingga

mengalami tunggakan atas pembayarannya hingga gagal bayar. Hal ini mengakibatkan terjadinya piutang yang tidak dapat ditagih karena adanya kendala atau masalah yang jelas dalam pelunasan piutang tersebut.

d. Pencatatan Piutang

Ketika perusahaan memberikan pinjaman kepada konsumen atau entitas lain maka akan menimbulkan adanya piutang, Pencatatan piutang yang timbul tersebut dilakukan oleh perusahaan mengikuti dengan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan dan mendapatkan otorisasi dari berbagai pihak yang berwenang. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa kekayaan perusahaan tercatat dengan tepat dan data akuntansinya dapat diandalkan untuk keperluan pelaporan keuangan serta pengambilan keputusan.

Menurut Mulyadi (2016:218) Proses pencatatan piutang berusaha untuk mencatat perubahan jumlah yang terutang kepada masing-masing debitur oleh bisnis. Transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang adalah beberapa contoh mutasi piutang yang biasanya terjadi.

Menurut Rudianto (2012:211) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2007 yang berlaku di Indonesia, Piutang dicatat dan diakui pada nilai jatuh tempo dikurangi jumlah proyeksi yang tidak akan diterima, yang merupakan jumlah kotor. Jumlah yang diantisipasi

untuk dapat ditagih harus digunakan untuk mencatat piutang. Korporasi harus membentuk cadangan kredit macet, yang merupakan perkiraan jumlah piutang yang tidak akan dapat dipulihkan pada waktu itu, karena berkaitan dengan pengelolaan piutang.

Prosedur pencatatan piutang ini bertujuan untuk mencatat setiap terjadinya mutasi piutang perusahaan kepada para debiturnya. Mutasi piutang disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1) Transaksi atas Penjualan Kredit

Transaksi ini berdasarkan faktur penjualan yang dilengkapi dengan dokumen utama maupun dokumen pendukung seperti surat jalan untuk pengiriman, surat muat terkait detail barang yang diterima oleh bagian piutang dan bagian penagihan. Pencatatan untuk transaksi ini direkam dalam jurnal penjualan. Sehingga, transaksi penjualan secara kredit ini akan menimbulkan terbentuknya piutang.

2) Transaksi dari Retur Penjualan

Transaksi jenis retur penjualan ini berdasarkan memo kredit yang dilengkapi oleh laporan penerimaan barang. Pencatatannya dilakukan di dalam jurnal umum atas retur penjualan. Retur penjualan akan mengurangi jumlah piutang dari perusahaan lain atas barang yang telah dikembalikan. Barang yang dikembalikan biasanya karena adanya cacat produk atau tidak sesuai pesanan.

### 3) Transaksi atas Penerimaan Kas dari Piutang

Transaksi ini berasal dari bukti kas masuk yang disertai dengan surat pemberitahuan tertulis dari pihak yang berutang mengenai pembayaran atau pelunasan piutangnya. Pencatatan atas transaksi ini direkam ke dalam jurnal penerimaan kas.

### 4) Transaksi Penghapusan Piutang

Transaksi penghapusan piutang berdasarkan bukti memorial (*journal voucher*) yang dibuat oleh fungsi kredit dengan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum.

### e. Penilaian Piutang

Piutang merupakan salah satu komponen akun yang terdapat dalam neraca. Meskipun demikian, dalam menentukan nilai yang akan dicantumkan dalam laporan, seringkali nominalnya masih belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya dapat tertagih. Fenomena ini didasari karena sebagian dari piutang tersebut tidak dapat direalisasikan atau ditagih.

Menurut Kieso (2011) , penilaian piutang seharusnya sebesar nilai realisasi bersih dimana nominal dari piutang tersebut telah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Menurut (Bahri, 2020) terdapat dua metode akuntansi yang digunakan untuk mengakui kerugian piutang tidak tertagih, yaitu:



Tanggal 1 September 2021 pemilik dari UD. XYZ datang dan menyatakan dapat melunasi sisa utangnya yang sebesar Rp. 3.000.000,-.

Jurnal yang harus dibuat untuk menimbulkan kembali piutang tersebut, yaitu:

**Piutang Usaha** **Rp. 3.000.000,-**

**Beban Piutang Tidak Tertagih** **Rp. 3.000.000,-**

Tanggal 1 Oktober 2021 diterima pelunasan dari UD. XYZ sebesar Rp. 3.000.000,- secara tunai.

Jurnal yang dibuat untuk mencatat pelunasan atas piutang tersebut, yaitu:

**Kas** **Rp. 3.000.000,-**

**Piutang Usaha** **Rp. 3.000.000,-**

Menurut pendapat dari Baridwan (2015:126) Perusahaan yang menggunakan metode penghapusan langsung (*direct write-off method*) ini tidak dapat menampilkan jumlah dari piutangnya yang diharapkan dapat tertagih dalam neraca, maka yang ditampilkan dalam neraca hanya sebesar jumlah piutang bruto, sehingga tidak sesuai dengan prinsip akuntansi di muka. Selanjutnya, terdapat kemungkinan bahwa pelaporannya tidak wajar, karena terdapat beban piutang yang tidak tertagih juga dilaporkan pada periode yang

tidak sesuai sebagai reaksi terhadap pengakuan dari pendapatan yang terlalu besar (*overstated*).

b) Metode Penyisihan atau Cadangan (*allowance method*)

Umumnya, perusahaan-perusahaan besar atau yang telah *Go Public* atau IPO cenderung menetapkan sejumlah dana yang diantisipasi tidak akan dapat terkumpul dari piutangnya. Tindakan ini dilakukan dalam setiap periode untuk mengantisipasi potensi ketidaktertagihannya piutang di masa mendatang. Karena saat terjadi piutang, belum dapat dipastikan secara pasti apakah jumlah piutang tersebut dapat ditagih atau tidak. Proses pencadangan dana di awal, untuk menghadapi kemungkinan piutang yang tidak dapat tertagih di masa depan, dicatat sebagai penyesuaian dalam jurnal akhir periode fiskal.

Contoh kasus pada tanggal 31 Desember 2020 PT. ABC menghitung taksiran kerugian piutang sebesar Rp. 4.000.000,-.

Pencatatan jurnal atas taksiran kerugian piutang, yaitu:

**Beban Piutang Tidak Tertagih      Rp. 4.000.000,-**

**Cadangan Kerugian Piutang      Rp. 4.000.000,-**

Pada tanggal 20 Januari 2021 PT. ABC menjual barang secara kredit kepada UD. XYZ sebesar Rp. 15.000.000,-. Selanjutnya diterima pembayaran pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp.



- 1) Menurunkan estimasi atas nilai piutang usaha yang diperkirakan dapat diubah dan diterima menjadi uang kas di masa mendatang.
- 2) Membuat penyisihan biaya penurunan nilai atas piutang tersebut sesuai dengan periode saat ini.

Ketika periode dari penjualan kredit berlangsung, pengeluaran akan dicatat menggunakan teknik penyisihan atau cadangan ini berdasarkan yang diharapkan tertagih. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan jumlah piutang tidak tertagih dari seluruh penjualan secara kredit atau berdasarkan jumlah total piutang terutang. Hal tersebut akan menjamin bahwa biaya laporan laba rugi sesuai dan bahwa evaluasi piutang lancar didasarkan pada realisasi kas neraca. Jumlah piutang bersih yang diantisipasi untuk dibayar tunai dikenal sebagai nilai realisasi bersih.

Sebagai contoh untuk menjadi gambaran kasus adalah Piutang Usaha yang dimiliki PT. ABC adalah Rp. 200.000.000, sedangkan Cadangan Kerugian Piutangnya yaitu Rp. 25.000.000. Jadi, dalam laporan posisi keuangan piutang tersebut dicatat sebagai berikut:

Piutang Usaha	Rp. 200.000.000
Cadangan Kerugian Piutang	<u>(Rp. 25.000.000)</u>
Piutang Bersih	Rp. 175.000.000

Dalam metode penyisihan atau cadangan, Menurut Kieso (2011) terdapat dua opsi utama yang dapat diterapkan dalam penentuan terkait jumlah piutang yang dianggap tidak tertagih, yaitu:

1. Persentase Penjualan (*percentage of sales basic*)

Perusahaan menetapkan persentase dari total penjualan yang dilakukan dengan metode kredit, dengan perkiraan kerugian yang mungkin timbul akibat piutang yang tidak dapat ditagih. Nilai persentase ini diambil berdasarkan pengalaman masa lalu dan kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pembentukan cadangan kerugian piutang didasarkan pada persentase tertentu dari saldo akun penjualan pada saat cadangan kerugian piutang diinisiasi, atau berdasarkan persentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau penjualan kredit dalam tahun berjalan (tahun ini).

Contoh kasus:

Tanggal 31 Desember 2015 penjualan bersih (*netto*) sebanyak Rp. 155.000.000,- dan penjualan kredit bersih sebanyak Rp 65.000.000,-. Persentase kerugian yang ditentukan adalah sebesar 1% dari saldo penjualan kredit, maka jurnal yang disusun pada tanggal 31 Desember 2015 untuk mencatat transaksi ini adalah:

**Beban Piutang Tidak Tertagih      Rp. 650.000,-**

**Cadangan Kerugian Piutang              Rp. 650.000,-**

## 2. Saldo Piutang

Tempo waktu yang terpaut semakin lama untuk melunasi piutang dapat menjadi kemungkinan kecil tertagihnya piutang tersebut. Menurut pendapat dari Bahri (2018), pembentukan cadangan penurunan nilai atas piutang didasarkan pada dua hal, yaitu saldo piutang dan analisis umur piutang:

a) Persentase tertentu dari saldo piutang, berarti cadangan kerugian piutang dihitung berdasarkan pada jumlah piutang yang ada pada saat penetapan atau dengan mengacu pada perkiraan penjualan kredit dalam periode tersebut.

1) Jumlah cadangan dinaikkan sampai persentase (%) tertentu dari saldo piutang.

Contoh kasus:

Tanggal 31 Desember 2015 akun piutang usaha menunjukkan saldonya sebesar Rp. 5.000.000,- dan akun cadangan kerugian piutang tidak tertagih menunjukkan angka Rp. 5.000,- posisi kredit. Persentase kerugian yang ditentukan sebesar 1% dari saldo piutang, maka jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 untuk mencatat jurnal dari contoh kasus ini adalah:

**Beban Piutang Tidak Tertagih    Rp. 45.000,-**

**Cadangan Kerugian Piutang      Rp. 45.000,-**

CADANGAN KERUGIAN PIUTANG			
	31/12/2015	Rp	5.000
	Kerugian Piutang	Rp	45.000
		Rp	50.000

Gambar 2.1 Contoh Buku Besar Akun Cadangan Kerugian Piutang Metode 1

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

*Perhitungan:*

Persentase kerugian sebesar 1% x Rp. 5.000.000 = Rp. 50.000

Saldo rekening cadangan kerugian piutang = Rp. 5.000

Jumlah yang ditambahkan ke rekening cadangan = Rp. 45.000

Setelah dilakukan jurnal seperti diatas, maka saldo rekening cadangan kerugian piutang saat ini yaitu Rp. 50.000.

- 2) Jumlah cadangan ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang

Metode ini disusun tanpa memperhatikan nominal saldo rekening akun cadangan kerugian piutang. Sehingga, hasil kali persentase kerugian piutang dikreditkan ke akun cadangan kerugian piutang. Apabila contoh kasus seperti diatas, maka:

**Beban Piutang Tidak Tertagih      Rp. 50.000,-**

**Cadangan Kerugian Piutang      Rp. 50.000,-**

CADANGAN KERUGIAN PIUTANG			
31/12/2015	Rp		5.000
Kerugian Piutang	Rp		50.000
	Rp		55.000

Gambar 2.2 Contoh Buku Besar Akun Cadangan Kerugian Piutang Metode 2

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Rekening cadangan kerugian piutang setelah dilakukan jurnal menunjukkan saldo sebesar Rp. 55.000,-.

- b) Analisis umur piutang (*aging schedule*), yaitu metode untuk menetapkan cadangan kerugian piutang tidak tertagih yang berdasarkan pada risiko atau peluang atas piutang tak tertagih. Pendekatan ini berasal dari ide gagasan bahwa semakin lama umur suatu piutang, semakin besar peluang penagihan yang terhambat atau bahkan fatalnya tidak terjadi penagihan sama sekali. Daftar utang dari masing-masing pelanggan harus disusun berdasarkan tanggal jatuh temponya, dan setiap piutang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan usianya. Usia piutang dihitung dengan cara membagi tanggal berdasarkan jatuh temponya dengan tanggal di mana daftar usia piutang dibuat.

Contoh kasus:

Pada tanggal 31 Desember 2005 saldo rekening piutang PT. Risa Fadila menunjukkan jumlah sebesar Rp. 7.500.000,00 yang dapat dirinci berdasar umurnya nampak sebagai berikut:

PT RISA FADILA								
Analisis Umur Piutang								
Per 31 Desember 2015								
Nama	Jumlah	Belum Jatuh Tempo	Jumlah Hari Jatuh Tempo					
			1-30 Hari	31-60 Hari	61-90 Hari	91-180 Hari	181 - 365 Hari	Lebih dari 1 Tahun
Alex	Rp 270.000	Rp 250.000	Rp 20.000	Rp -				
Basri	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Toko Indah	Rp 320.000	Rp 250.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
CV Jaya	Rp 1.410.000	Rp 1.300.000	Rp -	Rp 110.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PT Muda	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alaska & Co.	Rp 180.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 180.000
Mulyono	Rp 600.000	Rp 400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 200.000	Rp -	Rp -
UD Maju	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PT Sinar	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp -	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp -	Rp -	Rp -
Tasrif	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 250.000	Rp -				
Manan	Rp 250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000	Rp -
UD Sari	Rp 320.000	Rp 200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 120.000	Rp -	Rp -
Toko Malta	Rp 50.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50.000	Rp -	Rp -	Rp -
UD Polka	Rp 650.000	Rp 600.000	Rp 50.000	Rp -				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 7.500.000</b>	<b>Rp 6.000.000</b>	<b>Rp 350.000</b>	<b>Rp 250.000</b>	<b>Rp 150.000</b>	<b>Rp 320.000</b>	<b>Rp 250.000</b>	<b>Rp 180.000</b>

Tabel 2.1 Contoh Saldo Rekening Piutang PT Risa Fadila

Sumber: Baridwan (2015: 130)

Kemudian menentukan besaran persentase kerugian piutang untuk setiap kelompok usia piutang. Perhitungan kerugian untuk tiap kelompok usia ini sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan, kemudian dapat dilakukan penyusunan sesuai langkah-langkah berikut ini:

PT RISA FADILA			
Taksiran Kerugian Piutang Per 31 Desember 2015			
Kelompok Umur	Jumlah	Persentase Kerugian Piutang	Taksiran Kerugian Piutang
Belum Menunggak	Rp 6.000.000,00	0,50	Rp 30.000,00
Menunggak 1 - 30 Hari	Rp 350.000,00	1,00	Rp 3.500,00
Menunggak 31 - 60 Hari	Rp 250.000,00	2,00	Rp 5.000,00
Menunggak 61 - 90 Hari	Rp 150.000,00	5,00	Rp 7.500,00
Menunggak 91 - 180 Hari	Rp 320.000,00	10,00	Rp 32.000,00
Menunggak 181 - 365 Hari	Rp 250.000,00	30,00	Rp 75.000,00
Menunggak Lebih dari 1 Tahun	Rp 180.000,00	50,00	Rp 90.000,00
	Rp 7.500.000,00		Rp 243.000,00

Tabel 2.2 Contoh Taksiran Kerugian Piutang

Sumber: Baridwan (2015: 130)

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh jumlah kerugian piutang sebesar Rp. 243.000,00. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 rekening cadangan kerugian piutangnya sebesar Rp. 10.000,00, maka kerugian piutangnya sebesar Rp. 243.000,00 – Rp. 10.000,00 = Rp. 233.000,00.



Transaksi	Metode Cadangan	Metode Penghapusan Langsung
31/12/2016 Taksiran kerugian piutang Rp. 200.000	Kerugian piutang Rp. 200.000 Cadangan Kerugian Piutang Rp. 200.000	<i>Tidak ada jurnal</i>
15/04/2017 Menghapus piutang A sebesar Rp 250.000	Cadangan Kerugian Piutang Rp. 250.000 Piutang Usaha Rp. 250.000	Kerugian piutang Rp. 250.000 Piutang Usaha Rp. 250.000
01/07/2017 Pernyataan pelanggan X akan melunasi	Piutang Usaha Rp. 250.000 Cadangan Kerugian Piutang Rp. 200.000	Piutang Usaha Rp. 250.000 Kerugian Piutang Rp. 250.000
01/08/2017 Penerimaan uang dari piutang yang sudah dihapus	Kas Rp. 250.000 Piutang Usaha Rp. 250.000	Kas Rp. 250.000 Piutang Usaha Rp. 250.000

Gambar 2.4  
Perbedaan Metode Cadangan dan Penghapusan Langsung

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

f. Penyajian Piutang

Piutang termasuk klasifikasi aktiva lancar yang dipaparkan dalam laporan keuangan, yaitu neraca. Laporan keuangan yang dipaparkan harus mencerminkan secara jujur dan profesional posisi keuangan sehubungan atas kinerja bisnis perusahaan. Hal ini penting karena laporan keuangan akan menjadi sumber informasi keuangan yang *esensial* dan akan digunakan oleh berbagai pihak internal ataupun eksternal yang memiliki kepentingan.

Menurut Martani (2012:226), Penyajian piutang disajikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah piutang yang diestimasi dapat tertagih dari debitur pada tanggal neraca harus ditunjukkan dalam neraca. Neraca menunjukkan

piutang usaha dalam jumlah bruto dikurangi kerugian yang diproyeksikan atas piutang tak tertagih.

- 2) Saldo piutang dagang harus diungkapkan sebagai jumlah bersih di neraca jika bisnis tidak menetapkan cadangan untuk kerugian piutang..
- 3) Rincian harus dimasukkan dalam neraca jika piutang usaha memiliki jumlah yang signifikan pada tanggal neraca.
- 4) Piutang dagang yang bersaldo kredit (tercantum dalam daftar piutang pada tanggal neraca) seharusnya dilaporkan dalam kelompok jenis utang lancar.
- 5) Apabila jumlahnya signifikan dan cukup tinggi, piutang yang tidak berkaitan dengan aktivitas dagang seharusnya dijelaskan secara terpisah dari piutang dagang.

Sedangkan menurut Warren (2014:455), Kolom aset lancar neraca mencantumkan semua piutang yang diantisipasi akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun. Piutang sering diatur sesuai dengan tingkat likuiditasnya, yang merupakan urutan di mana aset diantisipasi untuk diubah menjadi uang tunai selama operasi bisnis reguler.

Penjelasan sebelumnya mengarah pada kesimpulan bahwa jumlah piutang bruto tetap harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) karena piutang tidak dapat direalisasikan hanya berdasarkan perkiraan. Organisasi IAI mencatat piutang dalam laporan keuangan sesuai

dengan nilai yang wajar, mengikuti prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAK 71. Nilai wajar ini merujuk pada harga pembelian atau nilai pertukaran yang telah disepakati oleh pihak-pihak terlibat pada tanggal terjadinya transaksi. Piutang dari pihak berelasi harus dinyatakan secara tegas karena adanya hubungan relasional dapat mempengaruhi nilai tukar ini.

Aset		Liabilitas dan Ekuitas	
Aset Lancar :		Liabilitas Jangka Pendek :	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Usaha	
Piutang Usaha - Neto		Pihak ketiga	xxx
Pihak ketiga	xxx	Pihak berelasi	xxx
Pihak berelasi	xxx	Utang Gaji	xxx
Persediaan - Neto	xxx	Utang Pajak	xxx
Perlengkapan	xxx	Pendapatan Diterima	xxx
Beban Dibayar Dimuka	xxx	Dimuka	xxx
Aset Lancar Lainnya	xxx	Liabilitas Lancar Lainnya	xxx
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>xxx</b>	<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>xxx</b>
Aset Tidak Lancar :		Liabilitas Jangka Panjang :	
Tanah	xxx	Utang Bank	xxx
Gedung	xxx	Obligasi	xxx
Akm. Peny. Gedung	xxx	Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	xxx
Kendaraan	xxx	<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>xxx</b>
Akm. Peny. Kendaraan	xxx	<b>Total Liabilitas</b>	<b>xxx</b>
Peralatan	xxx	Ekuitas :	
Akm. Peny. Peralatan	xxx	Modal	xxx
Aset Tidak Lancar Lainnya	xxx		
<b>Total Aktiva Tetap</b>	<b>xxx</b>		

Aset		Liabilitas dan Ekuitas	
		<b>Total Ekuitas</b>	<b>xxx</b>
<b>Total Aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>xxx</b>

Tabel 2.3 Contoh Penyajian Piutang di Neraca

Sumber: diolah Peneliti (2023)

### 3. Konservatisme

#### a. Pengertian Prinsip Konservatisme

Watts (2003) dalam buku Savitri (2016: 22) menjelaskan Konservatisme didefinisikan sebagai konsep hati-hati dalam pelaporan keuangan, di mana bisnis tidak terburu-buru dalam menilai dan mencatat aset dan pendapatan sambil segera mungkin mengenali potensi terjadinya kerugian dan utang. Ketika teori ini dipraktikkan, sistem akuntansi yang mencerminkan pendapatan atau aset yang lebih kecil dan utang yang lebih besar digunakan. Hal ini berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman dari risiko penurunan nilai (*downside risk*) dalam neraca serta melaporkan informasi yang kurang baik secara tepat waktu melalui laporan keuangan sesuai dengan pendapat dari Fitriany dan Haniati (2010).

Pengertian yang terdapat di Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) secara resmi dipaparkan

bahwa konservatisme diartikan sebagai respon yang hati-hati (*prudent reaction*) terhadap ketidakpastian yang ada di lingkungan perusahaan. Tujuan dari konservatisme adalah memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam operasi bisnis telah dipertimbangkan secara memadai. Menurut Juanda (2007), konservatisme adalah suatu prinsip akuntansi yang apabila diberlakukan akan menghasilkan nominal laba dan aset cenderung rendah, sementara nominal biaya dan hutang akan cenderung lebih tinggi. Kecondongan atas hal ini timbul karena prinsip konservatisme mendorong adanya pengakuan atas pendapatan dengan lambat dan percepatan terhadap pengakuan biayanya. Hasil akhirnya laporan laba nanti dapat cenderung terlalu rendah (*understatement*).

Menurut pengertian yang telah disebutkan, konservatisme dalam akuntansi adalah perilaku yang seringkali dapat membuat lambat atau tertundanya realisasi potensi laba sambil mempercepat identifikasi pengeluaran potensial. Sementara utang dinilai pada nilai terbesar dan aset dievaluasi pada nilai terendah dalam penilaian aset dan utang, masing-masing.

#### b. Prinsip Konservatisme

Prinsip dari konservatisme pendapat dari Savitri (2016:24) merupakan sebuah konsep yang hanya memperhitungkan pendapatan dan aset ketika mereka benar-benar dijamin untuk diterima; Namun demikian,

memperhitungkan biaya dan kewajiban sesegera mungkin, terlepas dari hasilnya. Menurut prinsip konservatisme, ia harus memiliki kecenderungan untuk melaporkan kerugian ketika ada keraguan tentang mereka. Di sisi lain, Anda tidak boleh melaporkan penghasilan jika ada keraguan tentang mereka. Agar aman, akun keuangan sering menghasilkan tingkat pendapatan dan nilai aset yang lebih rendah.

Prinsip konservatisme juga dapat diberlakukan dalam proses estimasi atau peramalan. Contoh saja, jika pada bagian penagihan memperkirakan bahwa suatu kelompok piutang akan mengalami 3% ketidakpastian pembayaran, sementara bagian penjualan cenderung memperkirakan angka 5% lebih tinggi karena kondisi penjualan industri yang kurang baik. Ketika melakukan penyisihan piutang, angka 5% digunakan dengan prinsip hati-hati, kecuali terdapat bukti kuat dan valid yang mengindikasikan sebaliknya. Kasus lain yang dapat menjadi gambaran penerapan prinsip konservatisme adalah LOCOM, dimana persediaan dicatat dengan menggunakan harga terendah antara beban atas pembelian atau disebut juga harga pasar saat ini.

c. **Konservatisme Akuntansi dalam PSAK**

Standar pencatatan akuntansi Indonesia PSAK berfungsi sebagai katalis untuk penggunaan konservatisme. Fakta bahwa ada beberapa opsi untuk teknik perekaman dalam keadaan yang sama menunjukkan

bagaimana prinsip konservatif diakui dalam PSAK. Hal ini menyebabkan angka laporan keuangan berbeda, yang akhirnya menghasilkan laba yang cenderung berhati-hati.

Sebagai contoh, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tentang inventaris menetapkan bahwa bisnis dapat melaporkan pengeluaran inventaris menggunakan pendekatan FIFO (first in, first out) atau FIFO dan teknik rata-rata tertimbang. Masa manfaat yang diantisipasi dari aset tetap diatur oleh PSAK No. 16 mengenai aset tetap dan aset lainnya. PSAK ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat yang digunakan untuk aset, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pelaporan laba secara konservatif. Selain itu, sesuai dengan PSAK No. 19 tentang aset tak berwujud dan metode amortisasi, terdapat berbagai cara untuk secara sistematis mengalokasikan jumlah penyusutan aset selama masa manfaatnya.

Nominal yang ditunjukkan dalam laporan keuangan akan berubah sebagai akibat dari beberapa opsi pendekatan ini. Sehingga sesuai dengan pendapat dari Savitri (2016: 25) dapat disimpulkan bahwa prinsip konservatisme secara tidak langsung akan berdampak pada hasil laporan keuangan. Penerapan prinsip ini juga dapat mengakibatkan fluktuasi dalam pendapatan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perkiraan laba untuk meramalkan arus kas masa depan perusahaan.

#### 4. PSAK 71

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 26 Agustus 2020. PSAK 71 adalah adopsi penyesuaian tahunan SAK 2018-2020 tentang Amandemen IFRS 9 Instrumen Keuangan yang efektif berjalan tanggal 1 Januari 2020 dengan aplikasi sebelumnya diperbolehkan.

PSAK 71 adalah pernyataan yang akan menggantikan PSAK 55 per 1 Januari 2020. Deklarasi ini adalah hasil dari penggantian IAS 39 oleh IFRS 9. Panduan untuk mengidentifikasi dan mengukur instrumen keuangan disediakan dalam pernyataan ini. Pernyataan ini mencakup informasi signifikan mengenai cadangan penurunan nilai atas aset keuangan dalam wujud berupa piutang, kredit, atau pinjaman serta temuan terbaru PSAK 55, yang relevan dengan klasifikasi aset keuangan.

Standar baru ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tidak tertagih. Jika berdasarkan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar (*incurred loss*). PSAK 71 memandatkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Dasar pencadangan yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian akibat kredit macet adalah menggunakan metode ekspektasi kerugian kredit

(*expected credit loss*) berdasarkan berbagai faktor, termasuk proyeksi ekonomi di masa mendatang.

Tujuan dari PSAK 71 adalah menetapkan standar pelaporan keuangan untuk aset dan kewajiban keuangan yang memberikan pembaca laporan keuangan data terkait yang dapat mereka gunakan untuk menilai ukuran, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan bagi perusahaan.

Beberapa pembahasan di dalam PSAK 71 yang menggantikan PSAK 55 mencakup berbagai hal, yaitu:

a) Klasifikasi dan Pengukuran

Perubahan pada klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 71 adalah Perubahan sesuai dengan model bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aset keuangan dan fitur arus kas kontraktual dari aset tersebut. Kecuali bila dinilai dengan biaya pembelian diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Namun, setelah pengakuan pertama atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang biasanya dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi, perusahaan dapat menggunakan opsi yang tidak dapat dibatalkan sehingga kenaikan nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Aset

keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Aset keuangan dikelola melalui model bisnis yang dirancang untuk tujuan memiliki aset keuangan guna memperoleh arus kas kontraktual, dan
- 2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu mengalami kenaikan arus kas melalui satu-satunya pembayaran utama dan bunga atas jumlah pokok yang belum dilunasi.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

Jika suatu organisasi memodifikasi model bisnis manajemen aset keuangannya, PSAK 71 mengesahkan reklasifikasi manajemen aset keuangan. Kami mengantisipasi bahwa modifikasi semacam itu akan sangat jarang. Modifikasi tersebut harus penting bagi operasi operasional entitas dan dapat dibuktikan kepada pihak ketiga. Mereka diputuskan oleh manajemen entitas atau pihak berwenang terkait sebagai respon atas perubahan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, modifikasi model bisnis entitas hanya akan terjadi jika perusahaan memulai atau berhenti melaksanakan tugas-tugas penting untuk operasinya, seperti

ketika entitas membeli, menjual, atau pemberhentian atas lini bisnis tertentu.

c) Pengakuan Kerugian Kredit yang Diharapkan

Untuk mengukur kerugian pada instrumen keuangan yang disebabkan oleh penurunan nilai keuangan, PSAK 71 mengembangkan pendekatan kerugian kredit yang diantisipasi. Teknik yang diadopsi oleh PSAK 71 mengamanatkan pengakuan cepat atas pengaruh perubahan proyeksi kerugian kredit setelah pengakuan pertama aset keuangan, berbeda dengan PSAK 55 sebelumnya yang mengakui kerugian kredit pada saat terjadi kerugian kredit.

d) Penurunan Kredit

Setiap perusahaan harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dalam PSAK 71 memiliki 3 tahapan berdasarkan tingkat risiko dari rendah ke tinggi. Klasifikasi CKPN pada PSAK 71, yaitu:

- 1) Tahap pertama yaitu Pertunjukan (*performing*), dimana tidak terjadi peningkatan risiko kredit dan aset keuangan tetap bernilai stabil. Sebagai contoh, dalam situasi pinjaman yang selalu tepat waktu dalam pembayarannya. Dalam contoh kasus

ini, *Expected Credit Loss* (ECL) diperkirakan dalam waktu 12 bulan.

- 2) Langkah berikutnya adalah Berkinerja buruk atau ragu-ragu (*underperforming*), dimana risiko kredit dan aset keuangan mengalami peningkatan yang cukup drastis. sebagai contoh, ketika pembayaran pinjaman melebihi 30 hari dari jatuh tempo, namun belum memenuhi kriteria tertentu. Jika seperti demikian, *Expected Credit Loss* (ECL) diperhitungkan hingga akhir masa jatuh tempo selama masa pemeliharaan (*lifetime*).
- 3) Kemudian tahapan terakhir yaitu Macet (*non-performing*), dimana pinjaman dan aset keuangan mengalami penurunan nilai yang signifikan sepanjang sejarah keterlambatan pembayaran. Apabila seperti ini, *Expected Credit Loss* (ECL) diakui hingga akhir masa jatuh tempo berakhir (*lifetime*).

Penurunan nilai merujuk pada situasi di mana nilai tercatat suatu aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. PSAK 55, yang kemudian direvisi menjadi PSAK 71, mengharuskan perusahaan untuk melakukan estimasi penurunan nilai aset keuangan, yang dikenal juga sebagai impairment. Bagi perusahaan di luar sektor pembiayaan, estimasi ini disebut sebagai cadangan piutang tidak tertagih. Cadangan piutang tidak tertagih

ini dihitung berdasarkan nilai tercatat aset, berdasarkan nilai biaya perolehan yang diamortisasi. Mengikuti panduan dari PSAK 71, estimasi ini menghasilkan jumlah kerugian penurunan nilai yang dapat berupa satu nilai kerugian atau kisaran nilai kerugian yang mungkin terjadi.

e) Akuntansi Lindung Nilai

Perubahan pada klausul yang mengatur bagaimana efisiensi lindung nilai dinilai. Kerangka akuntansi lindung nilai memudahkan integrasi operasional manajemen risiko dengan akuntansi instrumen lindung nilai. Diantisipasi bahwa aturan ini akan mengurangi distorsi ekonomi laporan laba rugi. Namun, perusahaan harus melacak upaya lindung nilai dan menawarkan bukti bahwa lindung nilai bekerja. Secara umum, standar akuntansi lindung nilai PSAK 71 memberikan metodologi yang lebih lugas dan alternatif lindung nilai baru. Misalnya, perusahaan industri sering menggunakan PSAK lama untuk alasan akuntansi lindung nilai, yang tidak memisahkan kontrak pasokan komoditas tertentu, untuk melakukan transaksi produk dan komoditas terhadap perubahan harga. Hal ini menyiratkan bahwa entitas dapat menerima solusi yang buruk dan laba rugi yang fluktuatif atau mengambil bobot yang lebih besar pada derivatif yang secara

eksplisit dirancang dalam kontrak. Sedangkan peraturan baru memungkinkan lindung nilai komponen tertentu dalam situasi tertentu, akuntansi yang lebih baik untuk realitas ekonomi. (PSAK No. 71, 2020)

Penerapan PSAK 71 membawa dampak perubahan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan terkait pengakuan dan penurunan nilai. Informasi yang dihasilkan dari instrumen keuangan menjadi lebih tepat waktu, relevan, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang menggunakan laporan keuangan. PSAK 55 mengadopsi model penurunan nilai dengan *incurred loss model* yang berarti penurunan nilai dalam instrumen keuangan dilakukan hanya ketika ada bukti obyektif terkait penurunan nilai tersebut. Sementara dibandingkan dengan PSAK 71 diterapkan *expected loss model*, dimana penurunan nilai pada instrumen keuangan didasarkan pada kerugian kredit yang diharapkan. Penerapan dari PSAK 71 ini mengamanatkan kepada setiap organisasi pada setiap tanggal pelaporan wajib melakukan penilaian apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah mengalami peningkatan secara signifikan sejak awal pengakuan dengan menggunakan informasi yang merujuk *forward looking* yang wajar dan *reasonable and supportable information*.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembentukan Cadangan Kerugian Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan PSAK 71 untuk PT. Integrasi Ide Indonesia Surabaya”. Peneliti melakukan studi pustaka atas penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ekaputri Ciptani Febriati (2013)	ANALISIS PENERAPAN PSAK 55 ATAS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai PT. BRI (Persero) Tbk. masih mengacu pada PSAK 50 (revisi 2006). Tetapi dalam proses pengakuan dan pengukuran CKPN yang diterapkan telah sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011).	Persamaan penelitian yaitu menganalisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang.	Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini dilakukan pada industri perbankan.
2	Ismie Iswara Akun,	ANALISIS PENERAPAN PSAK 50 DAN	Hasil dari penelitian ini bahwa proses	Persamaan penelitian yaitu	Perbedaan penelitian ini dilakukan

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Herman Karamoy, Meily Kalalo (2017)	55 ATAS IMPAIRMENT PIUTANG PADA PT. PUTRA KARANGETA NG	penyajian, pengakuan, dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2014).	menganalisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang.	pada industri bahan makanan.
3	Zilfa Maurida (2022)	ANALISIS PENERAPAN EXPECTED CREDIT LOSS (ECL) TERHADAP PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI MENURUT PSAK NO. 71 PADA	Hasil penelitian ini bahwa terdapat perbedaan signifikan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) antara sebelum dan sesudah penerapan ECL menurut PSAK 71 dan besaran laba bersih antara sebelum dan sesudah penerapan	Persamaan penelitian ini yaitu menganalisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang.	Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini dilakukan pada Lembaga pembiayaan.

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		LEMBAGA PEMBIAYAA N DI INDONESIA	metode ECL menurut PSAK 71.		
4	Duwi Rahayu (2021)	ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 71 TERHADAP CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (Studi Kasus pada PT Bank XYZ Tbk)	Hasil analisis dari penulisan ini adalah PT. Bank XYZ Tbk akan melakukan pembentukan CKPN tahap 1 sesuai ECL-12 bulan dan Pengakuan serta Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian PT. XYZ Tbk telah diterapkan sesuai ketentuan yang diatur di PSAK 71.	Persamaan penelitian ini adalah terkait cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di lembaga pembiayaan.

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Veronica Ilat, Harijanto Sabijono, Sintje Rondonuwu (2020)	EVALUASI PENERAPAN PSAK 71 MENGENAI INSTRUMEN KEUANGAN PADA PT. SARANA SULUT VENTURA MANADO	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa belum dilakukannya pembentukan CKPN menurut standar Akuntansi PSAK 71.	Persamaan penelitian yaitu menganalisis cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di lembaga pembiayaan.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

### C. Kerangka Konseptual

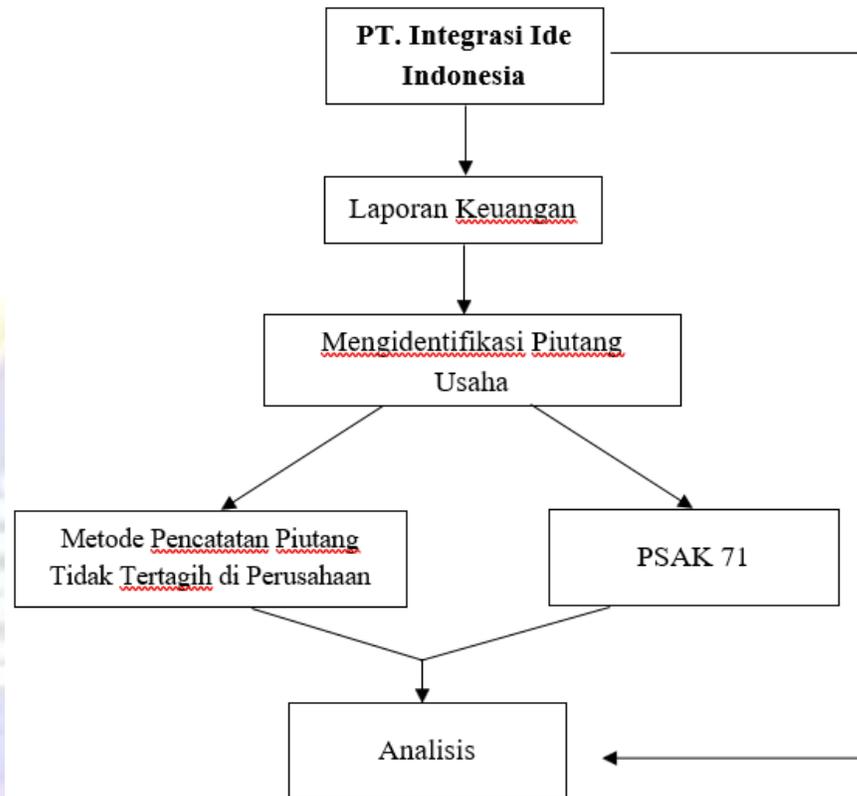
Kerangka konsep merupakan rangkuman kegiatan penelitian, dimulai dari perencanaan konsep, implementasi hingga tahap penyelesaian yang runtut. Kerangka konsep ini menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan berbentuk skema sederhana agar terperinci. Dasar dari kerangka konsep ini

yaitu PT. Integrasi Ide Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri pakaian jadi dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem penjualan secara kredit sehingga menimbulkan piutang usaha.

Piutang usaha merupakan semua hal yang berkaitan atas peminjaman berupa uang tunai atau non tunai, barang, dan atau jasa kepada lawan transaksi lain dengan pembayaran secara kredit maupun angsuran. Menurut Syakur (2015:111) Cadangan kerugian piutang merupakan perkiraan tandingan atau perkiraan penilai dari perkiraan kontrolnya yaitu piutang usaha. Oleh karena itu, di Neraca perkiraan cadangan kerugian piutang ini dilaporkan sebagai pengurang dari piutang usaha. Metode yang digunakan dalam pencatatan cadangan kerugian piutang termasuk metode tak langsung atau metode penyisihan. Metode penyisihan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Piutang usaha bruto dikurangi cadangan kerugian piutang akan menghasilkan piutang usaha neto yang ditampilkan di laporan keuangan.

Laporan keuangan meringkaskan aktivitas yang telah dicapai perusahaan sebagai suatu informasi terkait posisi akun-akun. Piutang yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tersebut akan dilakukan penilaian oleh peneliti terhadap penerapan piutang yang digunakan oleh perusahaan dengan penilaian menurut PSAK 71 yang berlaku terkait piutang. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terkait apakah penerapannya terhadap PSAK

71 yang berlaku telah sesuai atau tidak, bagaimana kebijakan yang telah diberlakukan. Sehingga, kerangka konsep tersebut akan digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah Peneliti (2023)